

# **PENGEMBANGAN KAPASITAS RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI KELURAHAN AWIPARI KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA**

**Silpi Saptiani Patah, Damay Rusli, Cicip Zemi Permadi**

STISIP Tasikmalaya

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Awipari, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya. Permasalahan yang ditemukan meliputi minimnya pembinaan dan pelatihan bagi RT dan RW, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kerangka analisis mengacu pada teori pengembangan kapasitas Marilee S. Grindle (1997) yang mencakup tiga dimensi, yaitu pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas RT dan RW belum berjalan secara optimal pada ketiga dimensi tersebut. Meskipun demikian, aspek pengadministrasian dalam dimensi reformasi kelembagaan telah menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Kata kunci: pengembangan kapasitas, RT, RW.

## ***Abstrack***

*This study aims to analyze the capacity development of Neighborhood Associations (Rukun Tetangga/RT) and Community Associations (Rukun Warga/RW) in Awipari Village, Cibeureum District, Tasikmalaya City. The problems identified include the lack of guidance and training for RT and RW officials, inadequate facilities and infrastructure, and limited understanding of duties and functions in accordance with existing regulations. This research employs a descriptive method with a qualitative approach. The analytical framework is based on Marilee S. Grindle's (1997) capacity development theory, which consists of three dimensions: human resource development, organizational strengthening, and institutional reform. The findings indicate that the capacity development of RT and RW has not been implemented optimally across all three dimensions. However, one aspect of institutional reform, particularly administrative management of RT and RW, has been implemented relatively well.*

*Keywords: capacity development, neighborhood association, community association.*

## **1. PENDAHULUAN**

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan struktur organisasi masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan komunitas di Indonesia. Sebagai unit terkecil dalam pemerintahan, RT/RW berfungsi sebagai jembatan antara

masyarakat dan pemerintah, serta sebagai wadah untuk mengorganisasi dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Dalam konteks desentralisasi, peran RT/RW semakin penting, karena mereka diharapkan dapat mengelola sumber daya lokal, merespons kebutuhan masyarakat,

dan melaksanakan program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, banyak RT/RW yang menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya.

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RT dan RW berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Peran ini diperkuat oleh Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, yang menyebutkan bahwa RT dan RW termasuk dalam lembaga kemasyarakatan yang bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat, mendukung perencanaan pembangunan, dan memfasilitasi pelayanan masyarakat. Selain itu RT/RW lebih lanjut dalam Perda No. 4 Tahun 2024, yang memberikan pedoman operasional bagi RT dan RW dalam mendukung tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan. Perda ini memastikan bahwa RT dan RW berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

RT adalah unit yang lebih kecil, biasanya mencakup beberapa rumah tangga, sementara RW mengoordinasikan beberapa RT dalam satu wilayah. Keberadaan RT dan RW sangat penting karena menjadi penghubung langsung antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus berfungsi sebagai wadah partisipasi warga dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan utama RT dan RW adalah membangun hubungan sosial yang harmonis antarwarga. Dalam masyarakat yang majemuk, RT dan RW menjadi sarana untuk mempererat hubungan

melalui kegiatan seperti kerja bakti, pengajian, arisan, dan acara kebudayaan. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memperkuat rasa kebersamaan tetapi juga menumbuhkan budaya gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Dengan adanya interaksi yang intens, warga dapat saling membantu dan mendukung, terutama dalam situasi darurat atau kesulitan.

Di sisi lain, RT dan RW berfungsi mendukung pelaksanaan pemerintahan. Mereka bertanggung jawab atas pendataan penduduk, pengelolaan administrasi, dan penyampaian informasi. Misalnya, RT dan RW sering kali membantu warga dalam pengurusan dokumen seperti surat keterangan domisili, surat pengantar, atau data kependudukan untuk keperluan resmi. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat lebih mudah menyalurkan bantuan sosial atau melaksanakan program-program seperti vaksinasi dan pendidikan. RT dan RW juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Melalui kegiatan seperti ronda malam, pengawasan terhadap warga baru, dan pelaporan aktivitas mencurigakan, RT dan RW membantu menciptakan rasa aman di masyarakat. Dalam hal terjadi konflik antarwarga, mereka sering menjadi mediator yang berusaha menyelesaikan masalah secara damai tanpa perlu melibatkan pihak berwenang. Pendekatan ini membantu menjaga keharmonisan lingkungan dan mencegah konflik berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Selain itu, RT dan RW mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan lingkungan. Mereka memfasilitasi musyawarah warga untuk menentukan prioritas pembangunan, seperti perbaikan infrastruktur, pengelolaan sampah, atau penghijauan. Dengan melibatkan warga secara langsung, RT dan RW memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini juga memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, sehingga warga lebih

bersemangat untuk menjaga dan memanfaatkannya.

Sebagai lembaga masyarakat tingkat paling bawah, RT dan RW bertanggung jawab secara strategis untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di kelurahan. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah kelurahan. Namun, dalam praktiknya, banyak RT/RW menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengetahuan, kegagalan dalam manajemen, dan sistem kelembagaan yang buruk. Akibatnya, peran RT/RW kurang efektif dalam memberdayakan masyarakat dan melaksanakan tugasnya. Dalam situasi seperti ini, pengembangan kapasitas menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja RT/RW. Menurut Grindle (1997), pengembangan kapasitas mencakup tiga dimensi utama: penguatan organisasi, reformasi kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Salah satu tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien. Reformasi kelembagaan berfokus pada perubahan sistem dan aturan kelembagaan untuk mendukung kinerja yang berkelanjutan, sedangkan penguatan organisasi berfokus pada perbaikan struktur dan proses agar lembaga lebih responsif dan adaptif. Dengan mengacu pada teori Grindle tersebut, pengembangan kapasitas RT/RW di kelurahan tidak hanya sebatas peningkatan kemampuan individu pengurus, tetapi juga harus melibatkan perbaikan struktur organisasi dan sistem kelembagaan yang mendukung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengembangan kapasitas RT/RW agar dapat meningkatkan peran dan fungsinya secara efektif dalam

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.

Secara keseluruhan, RT dan RW bukan sekadar unit administratif, melainkan pilar utama dalam membangun masyarakat yang mandiri, harmonis, dan sejahtera. Keberadaan mereka memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan, dari keamanan hingga pembangunan. RT dan RW juga menjadi penghubung yang efektif antara masyarakat dan pemerintah, memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi warga dapat terakomodasi dengan baik. Dengan peran yang begitu strategis, penguatan kapasitas RT dan RW menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di tingkat lokal.

Di sisi lain, tingkat pemahaman dan keterampilan pengurus RT dan RW dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga beragam. Banyak pengurus yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai tata kelola administrasi, penyusunan program kerja, dan prosedur pelaporan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang memadai dari pihak pemerintah atau lembaga terkait, sehingga pengurus menghadapi kendala dalam mengembangkan kemampuan diri dan struktur organisasi. Keterbatasan ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun tantangan utama yang dihadapi oleh pengurus RT dan RW dalam mengembangkan kapasitas mereka adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, dukungan teknis, maupun akses terhadap pelatihan. Sering kali, kegiatan yang dilakukan oleh pengurus RT dan RW bersifat sukarela dan tidak mendapatkan dukungan yang optimal. Kondisi ini membuat para pengurus kesulitan dalam meningkatkan kualitas layanan, seperti dalam menangani aduan warga, mendukung program-program pemerintah, dan membangun hubungan sosial di lingkungannya. Maka dari itu, diperlukan

upaya pengembangan kapasitas yang sistematis dan terencana bagi RT/RW. Pengembangan kapasitas mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dengan meningkatkan kapasitas RT/RW, diharapkan partisipasi masyarakat dapat meningkat, dan program-program yang dilaksanakan menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan Penelitian kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi suatu objek secara independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Suharsimi Arikunto (2013)

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*. Sugiyono (2017)

Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menyusun deskripsi, gambaran, dan representasi yang sistematis serta faktual mengenai fakta, karakteristik, dan interaksi antara fenomena yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti memusatkan perhatian pada isu yang bersifat aktual, yaitu Pengembangan Kapasitas Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Awipari, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan Lembaga kemasyarakatan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan Lembaga kemasyarakatan yang berperan penting dalam struktur pemerintahan di tingkat kelurahan. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan pemerintahan desa. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling dasar, yaitu lingkungan permukiman. Dalam kerangka pembangunan berbasis partisipasi masyarakat, RT dan RW berperan sebagai penghubung langsung antara warga dengan pemerintah kelurahan. Tugas dan fungsi mereka mencakup berbagai aspek, mulai dari pendataan kependudukan, penyampaian informasi kebijakan pemerintah, jembatan aspirasi antar sesama masyarakat dengan pemerintah daerah, menjadi penengah penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

RT dan RW memiliki fungsi utama sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam mensukseskan pembangunan, menjaga ketertiban lingkungan, dan memperkuat nilai-nilai gotong royong. Meskipun regulasi formal telah dicabut, secara de facto peran RT dan RW tetap berjalan dan dibutuhkan masyarakat. Dalam konteks pengembangan kapasitas, penting untuk meninjau ulang tugas dan fungsi mereka agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis. Hal ini mencakup pelibatan RT dan RW dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), penanganan darurat bencana, serta edukasi masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Sebagai lembaga yang beroperasi di tingkat kelurahan, rukun tetangga dan rukun warga harus berperan aktif dalam mendukung visi, misi, dan tujuan pembangunan pemerintah daerah. Rukun tetangga dan rukun warga perlu menjadi penggerak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki pelayanan pemerintah kelurahan, serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat. Selain itu, lembaga rukun tetangga dan rukun warga juga memiliki peran dalam penataan lingkungan hidup, berfungsi sebagai fasilitator yang menjaga komunikasi dan harmonisasi antara kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah kelurahan dengan masyarakat, serta memberikan masukan kepada masyarakat dan pemerintah secara objektif, optimal, dan berkelanjutan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

## 1. Kendala Utama Organisasi RT dan RW

RT/RW merupakan elemen fundamental dalam pengelolaan masyarakat. Sebagai entitas lokal, RT/RW memiliki potensi signifikan untuk mendukung pembangunan sosial dan administrasi warga, namun sering kali terhambat oleh kelemahan struktural. Penelitian sebelumnya mengidentifikasi berbagai permasalahan, antara lain:

- Rendahnya regenerasi kepemimpinan,
- Lemahnya pengelolaan administratif,
- Minimnya partisipasi masyarakat.

RT/RW memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan masyarakat. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai garda terdepan dalam menciptakan harmoni sosial dan mendukung pembangunan di tingkat lokal. Namun, tantangan dalam pengelolaan RT/RW, seperti pelanggaran masa jabatan, rendahnya partisipasi warga, dan kurangnya kapasitas kepemimpinan, perlu diatasi. Salah satu solusi strategis untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengembangkan kapasitas secara terarah dan berkelanjutan.

Kendala utama dalam pengelolaan RT/RW meliputi kelemahan kapasitas individu pengurus, kurangnya tata kelola organisasi yang baik, serta minimnya dukungan sistemik. Sebagai ilustrasi, pelanggaran masa jabatan sering terjadi akibat tidak adanya regenerasi kepemimpinan, di mana tidak ada individu yang dipersiapkan untuk menggantikan pemimpin yang telah menjabat terlalu lama. Selain itu, kurangnya keterampilan pengurus dalam bidang administrasi menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien, yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap RT/RW. Praktik terbaik dalam pengembangan kapasitas memiliki beberapa karakteristik penting:

Pertama, pendekatan yang berfokus pada kebutuhan lokal memastikan bahwa strategi yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya, di daerah yang mengalami konflik antarwarga, pelatihan manajemen konflik menjadi prioritas utama.

Kedua, penerapan sistem partisipatif, di mana warga dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, dapat menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap program pengembangan.

Selain itu, kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), juga merupakan elemen penting dari praktik terbaik. Dengan adanya pendampingan dari lembaga profesional, RT/RW dapat meningkatkan kapasitasnya dalam manajemen keuangan, perencanaan strategis, serta pemanfaatan teknologi. Contohnya adalah inisiatif digitalisasi administrasi RT/RW yang mempermudah pengelolaan data warga dan pelayanan administrasi.

Berikut adalah beberapa konteks untuk mengatasi berbagai Kendala:

- Pendidikan dan Pelatihan: Menyelenggarakan pelatihan bagi pengurus RT/RW mengenai kepemimpinan, manajemen konflik, dan administrasi yang modern.
- Digitalisasi Administrasi: Menerapkan sistem berbasis teknologi, seperti aplikasi e-RT/RW, guna mempermudah pencatatan data warga serta layanan surat-menyurat.
- Kerjasama dengan Pihak Eksternal: Bekerja sama dengan pemerintah, LSM, atau universitas untuk memperoleh pendampingan teknis dan pelatihan lanjutan.
- Penguatan Partisipasi Masyarakat: Mengikutsertakan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan program RT/RW.

Melalui implementasi ini, penguatan kapasitas RT/RW tidak hanya difokuskan pada hasil jangka pendek, tetapi juga membangun pondasi yang kokoh untuk keberlanjutan. Dengan demikian, RT/RW tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, melainkan juga sebagai agen perubahan sosial yang dapat mendorong kemajuan di tingkat lokal. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah,

masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, untuk mendukung penerapan praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Penguatan kapasitas RT/RW merupakan langkah strategis untuk menciptakan organisasi yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan merujuk pada penelitian sebelumnya dan mengadopsi praktik terbaik, RT/RW dapat mengatasi kelemahan yang ada dan meningkatkan perannya sebagai agen perubahan di tingkat lokal. Hal ini tidak hanya memperbaiki tata kelola masyarakat, tetapi juga mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Awipari berkaitan dengan pengembangan kapasitas RT dan RW Banyak pengurus RT dan RW yang belum sepenuhnya mengerti tugas, fungsi, dan batas kewenangan mereka sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dan prinsip-prinsip tata kelola kelembagaan yang seharusnya dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kurangnya pemahaman ini sering kali mengakibatkan pengurus RT dan RW menjalankan tugas secara tidak resmi berdasarkan kebiasaan, tanpa adanya pedoman kerja yang jelas.

Hasil penelitian lainnya, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam pembinaan yang diberikan oleh pemerintah, terutama dalam hal pelatihan yang berkaitan dengan birokrasi, tata laksana, dan administrasi. Selain itu, kurangnya dukungan dari pihak kelurahan menyebabkan struktur organisasi dan tata kerja RT/RW belum berjalan dengan optimal, sehingga ketua RT dan RW beroperasi secara mandiri tanpa dukungan dari pengurus lainnya seperti sekretaris dan bendahara.

Hal lainnya yang ditemukan adalah terdapat beberapa kasus di mana pengurus RT dan RW menjabat melebihi periode yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Batas waktu masa jabatan yang seharusnya diterapkan untuk menjaga regenerasi kepemimpinan dan semangat demokrasi justru dilanggar, dengan alasan tidak adanya calon pengganti, kepercayaan atau karena kebiasaan yang telah berlangsung lama. Pelanggaran terhadap ketentuan masa jabatan ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan

dan evaluasi terhadap kinerja RT dan RW, serta menunjukkan kurangnya pembinaan dari pihak kelurahan maupun kecamatan. Menyaksikan situasi tersebut, peningkatan kapasitas RT dan RW menjadi suatu keharusan yang mendesak. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya meliputi pelatihan administratif atau teknis, tetapi juga pendidikan mengenai regulasi, etika kepemimpinan, serta pentingnya pembatasan masa jabatan untuk keberlanjutan organisasi. Tanpa adanya intervensi berupa pelatihan yang terencana dan dukungan kebijakan yang kokoh, RT dan RW akan terus beroperasi dengan pola lama yang tidak sejalan dengan prinsip *good governance*.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan RT dan RW masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kompetensi sumber daya manusia, keterbatasan dukungan fasilitas, hingga lemahnya pembinaan berkelanjutan dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota, dapat menjadikan temuan ini sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat peran dan fungsi RT dan RW secara lebih sistematis. Pemerintah perlu mengembangkan program peningkatan kapasitas yang menyentuh aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, seperti pelatihan manajemen organisasi, penyusunan program kerja, fasilitasi musyawarah warga, serta peningkatan kemampuan komunikasi sosial. Selain itu, penting pula untuk memperkuat dukungan administratif, mulai dari pemberian insentif yang layak, penyediaan sarana penunjang kerja, hingga pendampingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah juga perlu memastikan adanya regulasi yang konsisten dan pengawasan yang adil, agar pelaksanaan masa jabatan dan mekanisme pemilihan pengurus RT dan RW dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan upaya yang terarah dan berkelanjutan ini, diharapkan RT dan RW mampu menjadi lembaga kemasyarakatan yang lebih profesional, akuntabel, dan partisipatif dalam menggerakkan pembangunan berbasis komunitas serta menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah secara efektif.

Dalam rangka menganalisis pengembangan kapasitas rukun tetangga dan rukun warga di Kelurahan Awipari, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, peneliti melakukan analisis terhadap permasalahan dengan menggunakan dimensi pengembangan Sumber Daya Manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan (Grindle, 1997: 45), yang dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Pengembangan SDM**

Pengembangan sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam sektor publik dan pemerintahan. SDM yang kompeten, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan akan mendorong terciptanya organisasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif organisasi, individu bukan hanya sekadar pelaksana tugas, melainkan juga aset strategis yang menentukan arah dan keberhasilan program kerja. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan SDM melalui pelatihan, pendidikan, peningkatan kapasitas teknis dan manajerial, serta penciptaan sistem insentif dan lingkungan kerja yang kondusif merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap personel mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara maksimal. Hal ini sejalan dengan pandangan Grindle (1997), yang menekankan bahwa pengembangan SDM tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan semata, tetapi juga mencakup reformasi kelembagaan dan penguatan struktur birokrasi yang mendukung kinerja individu. Dengan SDM yang unggul dan sistem pendukung yang kuat, organisasi akan lebih mudah beradaptasi dengan tantangan, menjalankan program secara efektif, dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian melalui parameter pelatihan/pembinaan RT RW, Kelurahan Awipari belum menunjukkan efektivitas yang optimal dalam menyelenggarakan pelatihan atau pembinaan bagi RT dan RW. Hal ini terlihat dari minimnya kegiatan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan secara rutin dan terstruktur. Akibatnya, banyak pengurus RT dan RW yang menjalankan tugasnya tanpa bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai,

sehingga berdampak pada kurangnya kualitas pelayanan dan koordinasi di tingkat masyarakat. Jika pelatihan atau pembinaan RT dan RW dilakukan secara individu oleh masing-masing RT/RW atau atas inisiatif pribadi, maka efektivitasnya cenderung tidak merata.

Selanjutnya parameter dalam dimensi pengembangan kapasitas Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah pelaksanaan tugas dan fungsi RT RW. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa masih ada beberapa RT dan RW yang belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan efektif. Hal ini menyebabkan keluhan dari masyarakat, terutama terkait dengan kurangnya respons terhadap kebutuhan dan pengelolaan kegiatan yang tidak optimal.

### **2. Penguatan organisasi**

Penguatan organisasi dalam konteks pengembangan kapasitas mencakup upaya untuk memperbaiki struktur internal, sistem kerja, sumber daya manusia, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam suatu organisasi publik Merilee S. Grindle (1997), sarana dan prasarana serta intensif adalah salahsatu Penguatan organisasi yang diberikan pemerintah untuk RT dan RW.

Sarana dan prasarana yang memadai serta pemberian insentif yang layak merupakan faktor penting dalam mendukung kinerja RT dan RW dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan tersedianya fasilitas seperti ruang pertemuan, alat tulis kantor, serta akses informasi dan komunikasi, RT dan RW dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam melayani masyarakat. Selain itu, insentif yang diberikan secara rutin dan sesuai juga menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi mereka, sekaligus motivasi untuk menjalankan tugas dengan lebih bertanggung jawab dan profesional dalam membina kehidupan sosial masyarakat.

Selanjutnya mengenai parameter yang dibahas adalah struktur organisasi yang efisien dan fungsional. Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara penulis struktur RT dan RW di Kelurahan Awipari belum berjalan secara optimal, ditandai dengan masih lemahnya koordinasi, kurangnya pelibatan pengurus dalam kegiatan, serta belum maksimalnya pembagian tugas sesuai fungsi masing-masing.

### **3. Reformasi Kelembagaan**

Reformasi kelembagaan menekankan pada perubahan struktur, aturan, serta

mekanisme kerja institusi agar lebih responsif, efisien, dan akuntabel dalam melayani masyarakat, Grindle (1997). Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja RT dan RW sangat penting dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadi semakin mendesak mengingat masih banyak ditemukan berbagai pelanggaran dan kesalahan. Evaluasi berfungsi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas RT dan RW telah sesuai dengan ketentuan dan harapan warga, serta mengidentifikasi hambatan atau kelemahan yang perlu diperbaiki.

Sementara itu, pengawasan berperan dalam memastikan adanya kepatuhan terhadap aturan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memberikan umpan balik yang konstruktif bagi perbaikan kinerja kelembagaan. Tanpa adanya pengawasan dan evaluasi yang rutin, sangat besar kemungkinan terjadi pembiaran terhadap praktik-praktik yang menyimpang, lemahnya akuntabilitas, serta penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga RT dan RW. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya reformasi kelembagaan di tingkat lokal.

Hasil penelitian yang dihasilkan dalam parameter sistem pengawasan dan evaluasi terhadap RT dan RW di Kelurahan Awipari telah dilaksanakan dengan baik, di mana RW diawasi dan dievaluasi oleh pihak kelurahan, sedangkan RT oleh RW. Melalui mekanisme ini, tidak hanya tercipta akuntabilitas dan peningkatan kapasitas kelembagaan, tetapi juga memungkinkan teridentifikasinya berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan, sehingga dapat segera dicari solusi yang tepat.

Parameter kedua dari Reformasi Kelembagaan adalah pengadministrasian RT dan RW. Hasil dari penelitian bahwasannya pengadministrasian RT dan RW sudah cukup baik. Karena, Format administrasi sudah disediakan oleh pemerintah atau kelurahan, maka pengurus RT dan RW dapat langsung mengerjakannya sendiri dengan cara mengikuti format yang telah ditentukan dan mengisi data yang diperlukan, seperti dalam pembuatan surat pengantar, pencatatan warga, maupun laporan kegiatan.

Parameter Selanjutnya dari dimensi Refomasi Kelembagaan adalah kebijakan regulasi massa jabatan RT dan RW. Namun,

hasil observasi dilapangan bahwasannya di Kelurahan Awipari masih ada beberapa yang melanggar aturan tersebut.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa pengembangan kapasitas Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Awipari Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya belum berjalan dengan baik atau optimal, dapat dilihat dari dimensi pengembangan kapasitas yang dijalankan belum optimal. Ketiga dimensi tersebut belum dilaksanakan dengan baik, namun ada salah satu dimensi reformasi kelembagaan dengan parameter pengawasan atau Evaluasi, dan pengadministrasian sudah berjalan dengan cukup baik.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Grindle, M.S. 1997. *Capacity Bulding in the public Sector Of Developing Countries*. Boston : Harvard Institue For International Development
- Moleong, J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian kuantitatif , Kualitatif dan Kombinasi R&D* . Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_(2016). *Metode Kualitatif dan Kuantitatif R&D* . Bandung: Alfabeta.

##### Jurnal

- Andalina.M.B, Tri Widodo. (2009) *“Pengembangan Kapasitas Rukun Tetangga Rukun Warga Sebagai Akar Rumpun dalam Era Desentralisasi Luas.”* Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi.
- Yanuardi. 2015. *“Pelaksanaan tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Delima Pekanbaru.”* Fisip Universitas Riau.

##### Peraturan Undang-Undang

- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya. Nomor 4 Tahun 2024. JDIH Kota Tasikmalaya.
- Peraturan Wali Kota Tasikmalaya. Nomor 20 Tahun 2024. Pembentukan Lembaga

Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan.  
JDIH Kota Tasikmalaya.  
Undang-Undang No 23 Tahun 2014.  
Pemerintahan Daerah. JDIH Kota  
Tasikmalaya.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.  
Mengenai Desa. JDIH Kota Tasikmalaya